



## PERANCANGAN PROSES BISNIS APLIKASI PADA ARSITEKTUR SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) KOTA DENPASAR

I Nyoman Yudi Anggara Wijaya<sup>1</sup>, I Made Alit Adiyana<sup>2</sup>, I Gede Putu Krisna Juliharta<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Sistem Informasi, Universitas Primakara, Denpasar, Bali

<sup>1,2,3</sup>Jln. Tukad Badung No 135 Denpasar, Bali

E-Mail: [inyomanyudi@gmail.com](mailto:inyomanyudi@gmail.com)<sup>1</sup>, [alitadiyana00@gmail.com](mailto:alitadiyana00@gmail.com)<sup>2</sup>, [krisna@primakara.ac.id](mailto:krisna@primakara.ac.id)<sup>3</sup>

### Article history:

Received: May 12, 2024

Revised: June 23, 2024

Accepted: July 5, 2024

Corresponding authors

[\\*inyomanyudi@gmail.com](mailto:inyomanyudi@gmail.com)

### Keywords:

TOGAF ADM;

Architecture Process Business;

SPBE.

### Abstract

*One of Bali's development missions is to develop a local governance system that is effective, efficient, open, transparent, accountable and clean and to improve integrated, fast and cheaper public services. As a form of transformation from the E-Government era, in 2018 the Government of Indonesia issued Presidential Regulation (Perpres) No. 95 of 2018, concerning the Electronic-Based Government System (SPBE) which includes central government, regional government and city government which aims to create efficient, effective and transparent governance as well as create quality and reliable public services. Denpasar City is one of the cities whose government has implemented various information systems as a form of Electronic Based Government (SPBE) implementation which refers to Perwali Denpasar No. 28 of 2021. In 2021, the Denpasar City Government will evaluate the implementation of the SPBE that has been running so far. The index value of the evaluation is 3.19 and is classified as good. From the results of the evaluation that has been carried out, it was found that in the SPBE Management Implementation domain the lowest score was obtained compared to other aspects. Based on these conditions, it is necessary to make efforts to improve the design of information systems from various aspects such as organizational business process architecture, data, applications, and technology in order to form integrated SPBE services.*



This is an open access article under the CC-BY-SA license.

### I. PENDAHULUAN

Salah satu misi pembangunan Bali yaitu mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, terbuka, transparan akuntabel dan bersih serta meningkatkan pelayanan publik terpadu, cepat dan lebih murah. Untuk mewujudkannya misi tersebut, Pemerintah Provinsi Bali menerapkan *E-Government* atau *Eletronic Government* dengan memanfaatkan berbagai teknologi sistem informasi dan komunikasi [1].

Sebagai bentuk transformasi dari era *E-Government*, Pada tahun 2018 Pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 95 tahun 2018, tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang mencakup pemerintahan pusat, pemerintahan daerah dan pemerintahan kota

yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efisien, efektif dan transparan serta mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Melalui Peraturan Menteri PANRB No. 59 tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik menyebutkan bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan SPBE di setiap instansi pusat dan pemerintah daerah perlu dilakukan evaluasi secara berkala [2].

Dari hasil evaluasi yang sudah dilakukan, ditemukan bahwa pada domain Penerapan Manajemen SPBE mendapatkan nilai terendah dibandingkan dengan aspek lainnya. Berdasarkan kondisi tersebut perlu adanya upaya peningkatan pada perancangan sistem informasi dari berbagai bidang aspek seperti arsitektur proses bisnis organisasi, data, aplikasi, dan

teknologi agar terbentuknya layanan SPBE yang terintegrasi.

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk menjelaskan penggambaran dari arsitektur pada peta proses bisnis SPBE Kota Denpasar dengan cara menerapkan model arsitektur SPBE menggunakan metode TOGAF ADM (Architecture Development Method). TOGAF ADM digunakan pada penelitian ini karena mempunyai model arsitektur yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dan dapat terintegrasi dengan arsitektur SPBE. TOGAF ADM adalah salah satu metode pengembangan dan pengelolaan pada siklus hidup Enterprise Architecture (EA). Metode TOGAF mengintegrasikan arsitektur dokument proses bisnis sesuai kebutuhan bisnis dan organisasinya [3].

## II. LANDASAN TEORI

### A. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

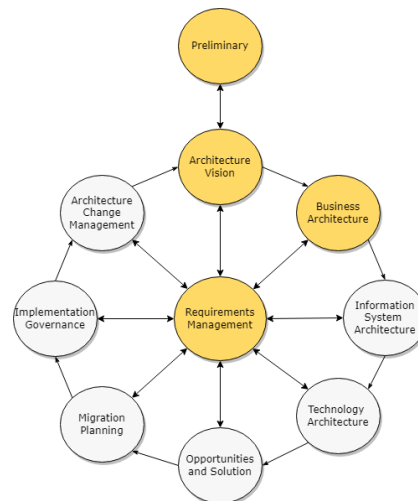
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau SPBE adalah sistem pemerintahan yang berjalan dengan memanfaatkan teknologi sistem informasi pada proses pelaksanaannya. Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 95 tahun 2018 yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan transparan serta mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Penyelenggaraan SPBE di Kota Denpasar mengacu pada Perwali No.28 tahun 2021.

### B. Enterprise Architecture (EA)

*Enterprise Architecture* (EA) adalah kegiatan untuk pengorganisasian data yang kemudian digunakan untuk mencapai tujuan dari proses bisnis pada organisasi tersebut. Hasil dari penerapan EA adalah berupa dokument-dokument yang menjelaskan bagaimana sistem informasi yang dibutuhkan suatu organisasi. EA dapat dijadikan acuan karena memiliki arsitektur yang baik dan dapat digunakan secara maksimal untuk pengembangan dan penyusunan dokument proses bisnis [4].

### C. TOGAF Architecture Development Method (ADM)

Pengembangan arsitektur sebuah organisasi memerlukan framework sebagai acuan untuk menuliskan secara detail bagaimana membangun dan mengelola serta mengimplementasikan Enterprise Architecture (EA) pada organisasi. Pada penelitian ini, perancangan Proses Bisnis mengacu pada Framework TOGAF [4]. Framework TOGAF memiliki delapan fase utama yaitu, Architecture Vision, Business Architecture, Information System Architecture, Technology Architecture, Opportunities and Solution, Migration Planning, Implementation Governance, dan Architecture Change Management [5]. Susunan fase-fase togaf dapat dilihat pada bagan gambar 2.1.



Gambar 1 TOGAF ADM Architecture

Deskripsi dari tiap fase yang digunakan adalah sebagai berikut:

#### 1. Preliminary Phase

Preliminary Phase merupakan kegiatan inisiasi kebutuhan dari bisnis organisasi serta penetapan prinsip-prinsip arsitektur dan metodologi yang akan digunakan sesuai arahan organisasi. Ruang lingkup pada penelitian ini yaitu perancangan EA SPBE arsitektur domain proses bisnis dari level 0 dan 1 hingga peta lintas fungsi yang menjelaskan pelayanan informasi dan komunikasi[6].

#### 2. Architecture Vision

Architecture vision merupakan fase awal yang menggambarkan cakupan dari ruang lingkup pengembangan arsitektur, mengidentifikasi stakeholder, serta aspek utama untuk mencapai visi misi organisasi.

#### 3. Business Architecture

Business Architecture, merupakan tahapan utama pada pemodelan strategi proses bisnis organisasi dengan melakukan pendefinisian dan penyusunan peta proses bisnis. Perancangan arsitektur proses bisnis pada penelitian ini mengacu pada amanah Perpres No. 95 tahun 2018 serta Permen PANRB No.19 tahun 2018. Tujuan penyusunan peta proses bisnis yaitu agar setiap instansi pemerintah mampu melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien. Peta proses bisnis juga memudahkan dalam mengomunikasikan baik kepada pihak internal maupun eksternal mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai visi, misi, tujuan dan memiliki aset pengetahuan yang mengintegrasikan dan mendokumentasikan secara rinci mengenai proses bisnis yang dilakukan.

## III. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian ini Menggunakan Metode *The Open Group Architecture Framework* (TOGAF) dengan menerapkan Architecture Development Method (ADM). Metode ini digunakan untuk merancang arsitektur proses bisnis di Kota Denpasar dengan menyesuaikan fase TOGAF ADM yang dimulai dari Preliminary Phase, Architecture Vision

dan Business Architecture serta Requirements Management untuk memastikan dari setiap proses perancangannya sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan organisasi[7].

A. Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Penulis melakukan observasi dengan pengamatan langsung yang dilakukan di Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfo) Kota Denpasar untuk mengetahui informasi serta mendapatkan data mengenai bagaimana penerapan SPBE terutama pada pelaksanaan proses bisnis di Pemerintahan Kota Denpasar. Pada kegiatan tersebut, peneliti mendapatkan data berupa dokumen penerapan SPBE di Kota Denpasar tahun 2021 serta dokumentasi SOP dari setiap proses kerja yang nantinya akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumentasi peta proses bisnis aplikasi di Pemerintahan Kota Denpasar.

2. Wawancara

Penulis melakukan wawancara untuk mengetahui informasi mengenai penyelenggaraan SPBE di lingkungan Kota Denpasar. Wawancara dilakukan kepada beberapa staff Diskominfo Kota Denpasar mengenai proses bisnis dari aplikasi apa saja yang akan diutamakan nantinya untuk dimasukkan ke dalam perancangan dokumen peta proses bisnis aplikasi tersebut.

3. Metode Dokumentasi

Pada penelitian ini, pendokumentasian bukti dan data berupa dokumen-dokumen SOP dari alur proses bisnis. Pengumpulan bukti dilakukan secara langsung di Diskominfo Kota Denpasar.

B. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif, yaitu data yang berupa hasil dari observasi, wawancara, dokumen-dokumen dan data lainnya. Data kualitatif yang digunakan pada penelitian ini diperoleh dari pengumpulan data dari hasil wawancara, pengumpulan dokumentasi bukti, serta proses observasi secara langsung terkait pelaksanaan dan penerapan proses bisnis di Diskominfo Kota Denpasar.

C. Instrumen Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 jenis, yaitu Data Primer dan Data Sekunder.

1. Sumber Data Primer

Data Primer pada penelitian ini dikumpulkan melalui hasil wawancara langsung kepada pihak Pemerintah Kota Denpasar serta pengumpulan bukti dari pelaksanaan SPBE.

2. Sumber Data Sekunder

Data Sekunder pada penelitian ini dikumpulkan melalui studi literatur yang telah ada dan dilakukan oleh peneliti lainnya. Sumber data yang digunakan meliputi buku, jurnal penelitian,

peraturan-peraturan pemerintahan, serta dokumentasi-dokumentasi penunjang yang valid dan dapat digunakan sebagai acuan penyusunan penelitian ini.

D. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif, yaitu data yang berupa hasil dari observasi, wawancara, dokumen-dokumen dan data lainnya. Data kualitatif yang digunakan pada penelitian ini diperoleh dari pengumpulan data dari hasil wawancara, pengumpulan dokumentasi bukti, serta proses observasi secara langsung terkait pelaksanaan dan penerapan proses bisnis di Diskominfo Kota Denpasar.

E. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 jenis, yaitu Data Primer dan Data Sekunder.

1. Sumber Data Primer

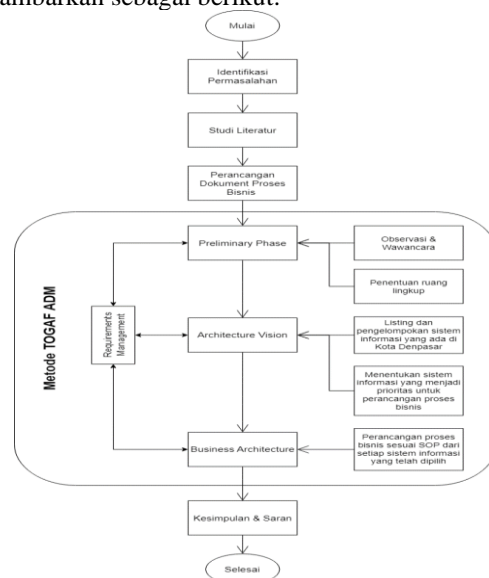
Data Primer pada penelitian ini dikumpulkan melalui hasil wawancara langsung kepada pihak Pemerintah Kota Denpasar serta pengumpulan bukti dari pelaksanaan SPBE.

2. Sumber Data Sekunder

Data Sekunder pada penelitian ini dikumpulkan melalui studi literatur yang telah ada dan dilakukan oleh peneliti lainnya. Sumber data yang digunakan meliputi buku, jurnal penelitian, peraturan-peraturan pemerintahan, serta dokumentasi-dokumentasi penunjang yang valid dan dapat digunakan sebagai acuan penyusunan penelitian ini.

F. Rancangan Alur Penelitian

Alur pelaksanaan penelitian ini disusun sesuai dengan urutan dari setiap kegiatan yang akan dilakukan oleh peneliti. Alur penelitian ini didasari dari jadwal dan urutan kegiatan yang dilakukan dan telah disepakati Bersama dengan pihak Diskominfo Kota Denpasar. Adapun alur dari penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2 Alur Penelitian

**IV. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penyusunan Proses Bisnis mengacu pada Framework TOGAF ADM. Fase TOGAF yang digunakan dimulai dari preliminary phase, architecture vision, dan business architecture yang disesuaikan dengan arsitektur SPBE menjadi arsitektur proses bisnis.

**A. Preliminary Phase**

**1. Wawancara**

Kegiatan wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab kepada staff Diskominfo Kota Denpasar yang berada di bawah Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Pengumpulan informasi dilakukan secara bertahap yang dimulai dengan membahas cakupan dari perancangan dokumen proses bisnis nantinya. Lalu setelahnya dilakukan pengumpulan dokumen pendukung yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan peta proses bisnis.

**2. Penentuan Ruang Lingkup**

Ruang lingkup pada penelitian ini yaitu perancangan EA SPBE arsitektur domain proses bisnis dari level 0 dan 1 hingga peta lintas fungsi yang menjelaskan pelayanan informasi dan komunikasi[8]. Prinsip arsitektur domain proses bisnis digunakan sebagai acuan untuk perancangan selanjutnya dilihat pada.

Tabel 1 Principal Catalog

No	Prinsip Bisnis	Deskripsi
1	<i>Primacy of Principles</i>	Prinsip-prinsip manajemen TI dan SPBE akan berlaku untuk seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar
2	<i>Information Management is Everybody's Business</i>	Seluruh OPD berpartisipasi dan selaras dalam keputusan manajemen informasi yang diperlukan untuk mendukung layanan pemerintah dan SPBE
3	<i>Common Use Applications</i>	Pengembangan aplikasi yang digunakan di seluruh Pemerintah Kota Denpasar tidak hanya disediakan untuk OPD tertentu
4	<i>IT Responsibility</i>	Diskominfo bertanggung jawab atas implementasi dan infrastruktur TI yang dapat menjadi solusi untuk memenuhi kebutuhan layanan Pemerintah Kota Denpasar
5	<i>Compliance with Law</i>	Setiap proses manajemen data dan informasi yang

No	Prinsip Bisnis	Deskripsi
		dijalankan oleh OPD di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar harus mempertimbangkan kepatuhan terhadap semua hukum, undang-undang, kebijakan, dan peraturan yang ada.
6	<i>Innovation</i>	Pemerintah Kota Denpasar dapat melakukan penelitian terstruktur dan mencari cara inovatif menggunakan teknologi untuk mendukung layanan pemerintah berbasis elektronik.

**3. Architecture Vision**

Pada penelitian ini, fase architecture vision menghasilkan artefak berupa Portofolio aplikasi yang mendefinisikan aplikasi apa saja yang terdapat pada pemerintah kota Denpasar serta dilakukan pengelompokan aplikasi yang ada sesuai dengan fungsi dari setiap aplikasi yang digunakan untuk membantu administrasi pemerintahan Kota Denpasar untuk memenuhi kebutuhan internal birokrasi[8].

Pemerintah Kota Denpasar memiliki portal website yaitu [www.denpasarkota.go.id](http://www.denpasarkota.go.id). Selain website utama, semua perangkat daerah juga telah memiliki website yang terdiri dari:

- 1) 1 (*satu domain*)
- 2) 60 (*enam puluh sub domain*)
- 3) 43 (*empat puluh tiga sub domain desa/kelurahan*).

Sedangkan untuk aplikasi dibagi menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu aplikasi khusus, aplikasi umum dan aplikasi pemerintah pusat.

**1) Aplikasi Khusus**

Aplikasi yang termasuk dalam kategori aplikasi khusus adalah sistem informasi yang digunakan di satu OPD yang dikembangkan dan dikelola hanya untuk memenuhi kebutuhan khusus di OPD tersebut.

**2) Aplikasi Umum**

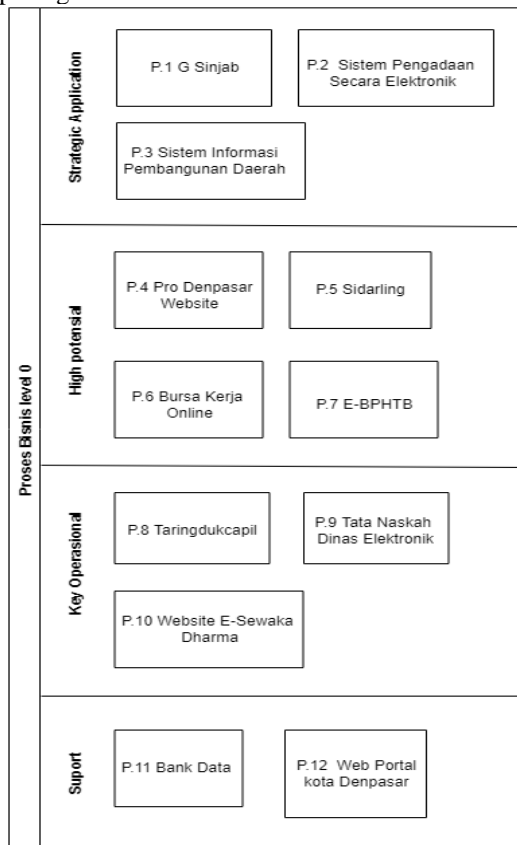
Aplikasi atau Sistem Informasi yang digunakan oleh lintas OPD, merupakan aplikasiaplikasi produk unggulan dari Pemerintah Kota Denpasar yang lebih banyak dipergunakan untuk melayani masyarakat secara online atau memanfaatkan teknologi informasi.

**3) Aplikasi Pemerintah Pusat**

Aplikasi atau Sistem Informasi yang merupakan sistem dari Pemerintah Pusat dan digunakan oleh OPD terkait, sistem ini dibangun oleh Pemerintah Pusat.

**4. Proses Bisnis**

Penyusunan proses bisnis berupa penggambaran dari keseluruhan proses yang digunakan untuk mencapai visi dan misi dari Pemerintahan Kota Denpasar. Berdasarkan hasil identifikasi portofolio aplikasi, terdapat 12 proses yang digambarkan dalam peta proses bisnis dengan pengkodean untuk penamaan dari proses yang ada. Penggambaran dari proses bisa dilihat pada gambar



Gambar 3 Proses Bisnis Level 0 Pemerintah Kota Denpasar

Pada peta proses bisnis dibagi menjadi 4 kategori, yaitu Strategic Application sebagai kategori proses bisnis yang dibutuhkan untuk keberhasilan bisnis pada masa mendatang, Key Operational sebagai kategori proses bisnis yang merupakan aktivitas utama dari Pemerintahan Kota Denpasar, Support sebagai kategori proses bisnis pendukung untuk keberlangsungan pemerintahan, dan high potensial sebagai kategori proses bisnis yang dapat menjadi keunggulan dan peningkatan kinerja kedepannya.

5. Hasil Evaluasi 2022

Penyusunan Dokumentasi Peta Proses Bisnis bertujuan untuk meningkatkan hasil evaluasi dari SPBE pada tahun sebelumnya. Pada tahun 2022 dilakukan evaluasi Kembali terhadap penerapan SPBE oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang ditetapkan pada tanggal 31 Januari 2023. Hasil dari evaluasi secara umum di Bali tersebut adalah sebagai berikut:

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Kab. Buleleng	3,03	Baik
2	Pemerintah Kab. Jembrana	2,76	Baik
3	Pemerintah Kab. Karangasem	2,16	Cukup
4	Pemerintah Kab. Bangli	2,28	Cukup
5	Pemerintah Kab. Badung	2,48	Cukup
6	Pemerintah Kab. Tabanan	2,74	Baik
7	Pemerintah Kota Denpasar	3,68	Sangat Baik

Gambar 4 Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah Bali

Dari hasil evaluasi secara menyeluruh di setiap kabupaten atau kota di Bali, Pemerintahan Kota Denpasar mendapat nilai tertinggi yaitu 3,68 dan berpredikat sangat baik. Adapun rincian hasil evaluasi di setiap domainnya adalah sebagai berikut:

PEMANTAUAN DAN EVALUASI		
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2022		
Domain dan Aspek Penilaian	Bobot	Predikat indeks SPBE
Domain 1 - Kebijakan SPBE	13%	
Aspek 1 - Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	13%	
Domain 2 - Tata Kelola SPBE	25%	
Aspek 2 - Perencanaan Strategis	10%	
Aspek 3 - Teknologi Informasi dan Komunikasi	10%	
Aspek 4 - Penyelenggaraan SPBE	5%	
Domain 3 - Manajemen SPBE	16,5%	
Aspek 5 - Penerapan Manajemen SPBE	12%	
Aspek 6 - Audit TIK	4,5%	
Domain 4 - Layanan SPBE	45,5%	
Aspek 7 - Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	27,5%	
Aspek 8 - Layanan Publik	18%	

NO	NILAI INDEKS	PREDIKAT
1	4.2 - 5.0	Memuaskan
2	3.5 - < 4.2	Sangat Baik
3	2.6 - < 3.5	Baik <sup>*)</sup>
4	1.8 - < 2.6	Cukup
5	< 1.8	Kurang

<sup>\*)</sup> Target penilaian: Predikat Baik (indeks minimal 2.6)

Gambar 5 Hasil Evaluasi SPBE Kota Denpasar

Nama Indeks	Nilai 2022
SPBE	3,68
Domain Kebijakan SPBE	5,00
Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	5,00
Domain Tata Kelola SPBE	3,40
Perencanaan Strategis SPBE	2,25
Teknologi Informasi dan Komunikasi	4,00
Penyelenggara SPBE	4,50
Domain Manajemen SPBE	3,18
Penerapan Manajemen SPBE	3,25
Audit TIK	3,00
Domain Layanan SPBE	3,64
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,30
Layanan Publik Berbasis Elektronik	4,17

Gambar 6 Index Nilai Evaluasi 2022

Nilai yang didapat pada setiap domain dapat dijabarkan sebagai berikut:

Indeks	Rata-rata Nilai						
	Nasional	Kementerian	LPNK	Lainnya	Provinsi	Kabupaten	Kota
SPBE	2,35	3,14	2,92	2,33	2,74	2,17	2,50
Domain Kebijakan	2,39	3,08	2,88	2,39	2,69	2,23	2,61
Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	2,39	3,08	2,88	2,39	2,69	2,23	2,61
Domain Tata Kelola	1,85	2,86	2,59	1,94	2,27	1,64	1,98
Perencanaan Strategis	1,70	2,63	2,33	1,90	2,00	1,53	1,70
Teknologi Informasi dan Komunikasi	1,92	2,93	2,77	2,04	2,40	1,68	2,11
Penyelenggaraan SPBE	2,02	3,16	2,75	1,83	2,57	1,78	2,28
Domain Manajemen	1,32	2,01	1,64	1,36	1,51	1,21	1,36
Penerapan Manajemen SPBE	1,35	2,14	1,62	1,37	1,55	1,23	1,41
Audit TIK	1,24	1,66	1,69	1,34	1,38	1,15	1,23
Domain Layanan SPBE	2,97	3,72	3,58	2,86	3,45	2,79	3,18
Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,03	3,71	3,58	3,07	3,46	2,85	3,23
Layanan Publik Berbasis Elektronik	2,89	3,74	3,58	2,55	3,44	2,71	3,09

Gambar 7 Nilai Rata-Rata Gambar

V. KESIMPULAN

Penyusunan peta proses bisnis pada Pemerintahan Kota Denpasar sebagai salah satu Langkah untuk mendapatkan gambaran dari program kerja dan kegiatan pemerintahan yang ada di Kota Denpasar. Peta proses bisnis dibuat dengan tujuan memudahkan pelaksanaan tugas dan fungsi pada organisasi agar dapat berjalan secara efektif dan efisien serta memudahkan untuk mengkomunikasikan baik kepada

pihak kepada pihak internal maupun eksternal terkait proses bisnis yang ada di Pemerintah Kota Denpasar.

Pada *architecture vision*, dihasilkan portofolio aplikasi yang berisikan 12 aplikasi terpilih dari total 72 aplikasi yang ada. Pada *architecture process*, dihasilkan 34 proses bisnis yang terdiri dari delapan proses bisnis pada *strategic application*, tujuh proses bisnis pada high potensial, empat belas proses bisnis pada *key operational*, dan tujuh proses bisnis pada *support*. Peningkatan nilai indeks SPBE Pemerintah Kota Denpasar dari 3,19 menjadi 3,68 pada tahun 2022 merupakan dampak dari penyusunan peta proses bisnis ini.

#### **REFERENCES**

- [1] I. W. Muka, M. A. Widyatmika, and I. K. G. D. Putra, "Pengembangan Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Provinsi Bali," *J. Bali Membangun Bali*, vol. 1, no. 3, pp. 253–276, 2020, doi: 10.51172/jbmb.v1i3.142.
- [2] U. C. Setiono, "Peraturan Menteri PANRB No. 59 Tahun 2020," no. April, 2021.
- [3] Y. Mulyanto and D. Rosiyadi, "Perancangan Arsitektur Enterprise untuk Mendukung Proses Bisnis Menggunakan TOGAF Architecture Development Methode (ADM) di STMIK Dharma Negara," *J. Tata Kelola dan Kerangka Kerja Teknol. Inf.*, vol. 4, no. 1, pp. 34–47, 2018, doi: 10.34010/jtk3ti.v4i1.1398.
- [4] M. Majstorovic and R. Terzic, "Enterprise architecture as an approach to the development of information systems," *Vojnoteh. Glas.*, vol. 66, no. 2, pp. 380–398, 2018, doi: 10.5937/vojtehg66-15850.
- [5] R. A. Hermawan and I. D. Sumitra, "Designing Enterprise Architecture Using TOGAF Architecture Development Method," *IOP Conf. Ser. Mater. Sci. Eng.*, vol. 662, no. 4, 2019, doi: 10.1088/1757-899X/662/4/042021.
- [6] J. Negara, "Peraturan Walikota Denpasar Nomor 28 Tahun 2021," p. 6, 2021.
- [7] I. N. Y. A. Wijaya and I. G. A. N. I. Adnyana, "Analisis Dan Perancangan Arsitektur Enterprise Stmik Primakara," *J. Teknol. Inf. dan Komput.*, vol. 5, no. 3, pp. 297–305, 2019, doi: 10.36002/jutik.v5i3.802.
- [8] G. S. N. Kuru, S. F. S. Gumilang, and R. A. Nugraha, "Model Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Spbe) Domain Proses Bisnis Pada Pemerintah Kabupaten Kuningan," *JIPi (Jurnal Ilm. Penelit. dan Pembelajaran Inform.*, vol. 6, no. 2, pp. 369–378, 2021, doi: 10.29100/jipi.v6i2.2116.